

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARCIS PARKIR BERHADIAH DI JALAN WALIKOTA MUSTAJAB

Dheny Iswan Roesnanda

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
E-mail: dhenyiswanroes@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
E-mail: Prabawatiindah@yahoo.co.id

Abstrak

Salah satu inovasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam mengoptimalkan PAD retribusi parkir adalah dengan dikeluarkannya kebijakan baru berupa kebijakan karcis parkir berhadiah. Kebijakan karcis parkir berhadiah ini memiliki sedikit perbedaan dengan karcis parkir biasa pada umumnya, dimana dalam setiap karcis parkir yang resmi dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini terdapat kolom hologram yang nantinya dapat digosok. Dari beberapa karcis parkir berhadiah yang berhologram tersebut tersedia beberapa hadiah menarik yang nantinya dapat diambil di Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi Merilee S. Grindle, yang terdiri dari dua variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan karcis parkir berhadiah di Jalan Walikota Mustajab secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator dari variabel isi kebijakan dan lingkungan kebijakan tetapi dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala yaitu sikap juru parkir yang dirasa masih kurang dalam menjalankan tugas untuk melayani pengguna jasa parkir dan keterlambatan sistem pendistribusian karcis parkir kepada pihak juru parkir. Saran dari peneliti yaitu harus diadakannya sistem perekrutan juru parkir untuk mendapatkan SDM yang lebih baik, melakukan inspeksi mendadak ke kawasan parkir untuk peninjauan dan pengecekan, serta melakukan penindakan secara tegas kepada pelaksana kebijakan yang melakukan kecurangan dalam menjalankan kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, karcis parkir, berhadiah.

Abstract

One of the innovations of Transportation Department of Surabaya in optimizing PAD parking fees, issuing new policies in the form of policies parking ticket prizes. These prizes parking ticket policy has little difference with the usual parking tickets in general, which in any official parking tickets from Surabaya City Department of Transportation, there are columns hologram that can later be rubbed. Of some parking tickets with prizes that the hologram provided some interesting gifts that will be taken at the Department of Transportation in Surabaya.

This research use descriptive research with a qualitative approach. The focus of the research used in this research is the implementation model Merilee S. Grindle, which consists of two variables: the contents of the policy and the policy environment.

The results showed that the implementation level parking ticket prizes at Walikota Mustajab Street have generally been conducted in accordance with the indicators of the variable contents of the policy and the policy environment but in implemetation still found some constraints, namely the attitude of parking attendants that it is still lacking in the line of duty to serve parking service user and system delay distribution of the parking ticket to the parking attendants. Advice from researchers that should be holding a recruitment system of parking attendants to get better employee, make unannounced visits to the parking area for review and clearance, as well as to take actions explicitly to the implementers who commit fraud in implementing the policy.

Keywords: Implementation, Parking Ticket, Prizes.

PENDAHULUAN

Seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya agar Pemerintah Daerah memiliki motivasi untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tentunya setiap daerah memiliki cara sendiri untuk mengelolanya dikarenakan adanya ketidaksamaan luas daerah, budaya, maupun dalam segi sumber pemasukan anggaran daerah.

Sumber pemasukan anggaran daerah dapat dijadikan tolak ukur indikator tingkat kemajuan suatu daerah, sumber-sumber pendapatan daerah dapat dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada tiap daerah, salah satu yang dimaksud yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti yang disampaikan oleh Halim (2001:52), mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dan aparaturnya bekerja sama untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing, peranan aparaturnya akan sangat dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan tugas pemerintah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah semestinya didapat dari pendapatan asli daerah yang sah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 22 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. (<http://www.bpkad.jatim.go.id>, diakses pada 2 September 2016)

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut yang memiliki potensi yang cukup tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah penerimaan yang didapat dari sumber-sumber dalam daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 108 ayat 1 tentang penetapan objek/golongan retribusi menetapkan retribusi daerah kedalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Retribusi Parkir.

Langkah Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan retribusi parkir ialah dengan dikeluarkannya peraturan baru berupa

Perwali Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir dan Perwali Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (TJU). Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Surabaya menerapkan harga baru bagi pengguna sepeda motor yang selama ini dikenai tarif senilai Rp. 500 naik menjadi Rp. 1.000. Untuk tarif pengguna mobil, sedan, pick up, naik dari Rp. 1.500 menjadi Rp. 3.000. Sedangkan untuk tarif satu kali parkir di tempat parkir insidental, tarif motor naik dari Rp. 1.500 menjadi Rp. 2.000, dan mobil, sedan, pick up naik dari Rp. 2.500 menjadi Rp. 4.000, serta truk mini naik dari Rp. 4.000 menjadi Rp. 6.000. (<http://kominformojatimprov.go.id/> diakses pada 2 September 2016). Peraturan Walikota tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dijadikan sebagai dasar dari sebuah kebijakan yang tujuannya mengoptimalkan retribusi parkir pada suatu daerah.

Pemerintah Kota Surabaya menugaskan Dinas Perhubungan (DISHUB) untuk memberikan inovasi melalui Kebijakan Karcis Parkir Berhadiah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang menggantikan kebijakan karcis parkir berhadiah yang sebelumnya karena dirasa masih kurang efektif yang semula dilakukan pengundian setiap tahun kini dilakukan langsung tanpa diundi. Kebijakan karcis parkir berhadiah tersebut mulai dilaksanakan tanggal 01 Maret 2016. Tujuan dari diberlakukannya karcis parkir berhadiah ini diharapkan agar juru parkir lebih baik dalam menjalankan tugasnya dan para pengguna jasa parkir tidak segan untuk meminta karcis parkir pada juru parkir, dalam kata lain jika pengguna jasa parkir berani untuk meminta karcis maka dapat mengurangi potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya dari sektor Retribusi parkir. (<http://dishub.surabaya.go.id/>, diakses pada 2 September 2016).

Kebijakan baru mengenai karcis parkir berhadiah di Kota Surabaya ini sesuai dengan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 tentang Perubahan tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2015 tentang Perubahan tarif retribusi tempat khusus parkir. Berawal dari beberapa permasalahan tentang penarikan biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang sudah ada pada karcis dan kecurangan oleh pihak juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir, maka dikeluarkanlah Peraturan Walikota tersebut yang menggantikan PERDA Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan PERDA Kota Surabaya No. 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Implementor dari kebijakan ini adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya, koordinator juru parkir dan juru parkir. Kelompok sasaran dari kebijakan adalah juru parkir yang diharapkan dengan adanya kebijakan ini wajib memberikan karcis kepada para pengguna jasa parkir dan para pengguna jasa harus meminta karcis apabila juru parkir tidak memberikan karcis parkir

berhadiah tersebut. Perubahan karcis parkir biasa menjadi karcis parkir berhadiah ini merupakan salah satu program yang dicanangkan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Bentuk karcis parkir berhadiah ini memiliki model baru yaitu memiliki hologram yang dapat digosok dan jika beruntung akan mendapat hadiah berupa helm, blender, kipas angin, dispenser hingga oli motor dan hadiah tersebut dapat diambil di Dinas Perhubungan (DISHUB). (<http://dishub.surabaya.go.id/>, diakses pada 2 September 2016).

Salah satu lahan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan yang memiliki beberapa permasalahan yakni lahan parkir yang ada di Jalan Walikota Mustajab Surabaya. Hal itu ditunjukkan dengan adanya beberapa keluhan masyarakat mengenai tarif parkir yang diminta oleh juru parkir tidak sesuai dengan tarif yang ada, tidak diberikannya karcis parkir berhadiah kepada pengguna jasa parkir, selain itu penggunaan tempat parkir Tepi Jalan Umum yang kurang disiplin karena seringkali melebihi batas garis parkir yang ada sehingga mempersempit lebar jalan umum. Jalan Walikota Mustajab merupakan kawasan yang padat karena menjadi salah satu tempat kuliner yang terkenal di Kota Surabaya, hal tersebut yang menjadi alasan juru parkir semakin tertarik untuk melakukan kecurangan melakukan penarikan tarif parkir dan memakai batas garis parkir yang telah ditentukan sehingga membuat jalan umum semakin sempit.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan keberhasilan Implementasi Kebijakan Karcis Parkir Berhadiah di Jalan Walikota Mustajab. Dimana dengan Implementasi Kebijakan Karcis Parkir Berhadiah Ini diharapkan dapat menunjang pemasukan retribusi parkir dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Surabaya. Atas dasar hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Karcis Parkir Berhadiah di Jalan Walikota Mustajab”**

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian terletak di Taman Remaja Surabaya, Jalan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Lokasi penelitian ini yaitu pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal No. 1 Surabaya dan kawasan parkir Jalan Walikota Mustajab Surabaya.

Fokus penelitian menggunakan model implementasi Merilee S. Grindle yang dikenal sebagai *Implementation as A Political and Administrative Procces*, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu tingkat implementasi kebijakan itu sendiri dan proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei atau observasi. Dilengkapi juga dengan catatan hasil observasi yang ditemui selama di lapangan. Data primer ini berupa:

- a. Catatan dari hasil wawancara
- b. Hasil observasi lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kebijakan yang ada
- c. Data-data dari informasi

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia, sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkannya saja. Dalam hal ini data-data yang diperoleh berupa arsip dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya serta data-data lain yang diperoleh dari studi kepustakaan dan *website*.

Teknik Pengumpulan data adalah suatu proses data primer untuk keperluan dalam penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang dikumpulkan harus valid. Valid atau tidaknya data yang dikumpulkan harus melalui beberapa metode dalam membantu pengumpulan data yang lengkap sehingga dapat mendukung landasan teori. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karcis parkir berhadiah merupakan sebuah inovasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Karcis parkir berhadiah ini memiliki sedikit perbedaan dengan karcis parkir biasa pada umumnya, dimana dalam setiap karcis parkir yang resmi dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini terdapat kolom hologram yang nantinya dapat digosok. Dari beberapa karcis parkir berhadiah yang terdapat hologram tersebut tersedia beberapa hadiah yang menarik.

Kebijakan baru mengenai karcis parkir berhadiah di Kota Surabaya ini sesuai dengan Perwali Nomor 36 tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Perwali Nomor 37 tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir. Kebijakan ini menggantikan kebijakan karcis berhadiah yang sebelumnya. Perbedaannya terletak pada sistem pengundian hadiah kebijakan yang lama dilakukan satu tahun sekali, sedangkan karcis parkir berhadiah yang baru ini terdapat hologram yang langsung bisa digosok dan berisi hadiah jika beruntung. Pengguna jasa parkir yang beruntung akan mendapatkan hadiah sesuai dengan tulisan yang tertera pada hologram tadi maka karcis tersebut bisa langsung ditukarkan dengan

hadiah yang dapat diambil ke Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Kebijakan karcis parkir berhadiah di Jalan Walikota Mustajab pada penelitian ini dianalisis menggunakan teori Model Implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Model implementasi oleh Grindle ini melihat variabel isi kebijakan dan lingkungan kebijakan sebagai pijakan dalam mengkaji permasalahan implementasi kebijakan karcis parkir berhadiah di Jalan Walikota Mustajab Kota Surabaya. Berikut ini adalah hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi kebijakan karcis parkir berhadiah di Jalan Walikota Mustajab Kota Surabaya. Jika dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, maka mencakup hal-hal berikut:

1. Isi Kebijakan

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Indikator ini menggambarkan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Pada implementasi kebijakan karcis parkir berhadiah di Jalan Walikota Mustajab ini, kepentingan-kepentingan kelompok sasaran berasal dari pihak juru parkir. Dalam hal ini, pihak juru parkir dirasa memiliki pengaruh yang paling besar apakah kebijakan karcis parkir berhadiah yang dicanangkan oleh Dinas Perhubungan ini dapat terealisasi atau tidak.

b. Tipe manfaat

Jenis manfaat dalam suatu kebijakan dikatakan tepat apabila manfaat tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh *target group*. Isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Pada hasil penelitian dapat dilihat bahwa manfaat dari dikeluarkannya kebijakan karcis parkir berhadiah oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya yaitu memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat sebagai pengguna jasa melalui kebijakan karcis parkir berhadiah dimana masyarakat dapat berkesempatan mendapatkan hadiah secara langsung. Selain itu masyarakat menjadi lebih berani dan tidak segan untuk meminta karcis parkir kepada juru parkir apabila tidak diberi karcis oleh juru parkir, hal tersebut dapat membantu Dinas Perhubungan dalam kesuksesan implementasi kebijakan karcis parkir berhadiah. Selain manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dengan adanya kebijakan karcis parkir berhadiah ini pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya menjadi lebih mudah untuk pengelolaan sistem perparkiran yang ada di Kota Surabaya.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Pada indikator derajat perubahan yang ingin dicapai yang ingin dijelaskan

pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

Dalam kebijakan karcis parkir berhadiah oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki target perubahan yang ingin dicapai yaitu diharapkan juru parkir lebih profesional dalam bekerja dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat membantu merapikan kendaraan yang akan parkir, menjaga ketertiban kawasan parkir, menarik tarif parkir sesuai dengan tarif yang sudah tertera pada karcis parkir, serta selalu memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir.

d. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini akan dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.

Kebijakan karcis parkir berhadiah merupakan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya. Dengan adanya kebijakan ini yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan karcis parkir berhadiah ini yaitu Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan mandat kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan dikeluarkannya Perwali Nomor 36 tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Perwali Nomor 37 tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang kemudian oleh pihak Dinas Perhubungan digunakan sebagai dasar dari Kebijakan karcis parkir berhadiah ini. Jadi pihak yang bersangkutan atau yang terlibat pada letak pengambilan keputusan ini yaitu pemerintah Kota Surabaya yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan.

e. Pelaksana program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Pelaksana kebijakan karcis parkir berhadiah ini adalah staff Dinas Perhubungan Kota Surabaya, koordinator juru parkir dan juru parkir.

Dengan adanya implementor yang jelas, maka akan memudahkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan kebijakan karcis parkir berhadiah sudah jelas dan tepat. Kejelasan implementor dapat terlihat dari pembagian tugas masing-masing pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karcis parkir berhadiah.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya yang memadai agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia

dan sumber daya peralatan. Pengguna jasa parkir menyatakan bahwa juru parkir yang bertugas di lapangan dirasa kurang profesional dan kurang baik dalam menjalankan tugasnya. Bentuk kecurangan juru parkir dapat dilihat seperti tidak diberikannya karcis parkir berhadiah kepada pengguna jasa parkir dan sikap acuh juru parkir ketika ada masyarakat yang parkir tidak membantu merapikan kendaraan yang diparkir, namun ketika pengguna jasa parkir hendak keluar parkir mengeluarkan kendaraan juru parkir tiba-tiba muncul meminta tarif parkir.

Sedangkan sumber daya peralatan yang digunakan adalah semua keperluan yang berhubungan dengan kegiatan karcis parkir berhadiah meliputi karcis parkir berhadiah berhologram, hadiah karcis parkir berhadiah dan rompi untuk juru parkir yang bertuliskan karcis parkir berhadiah. Dengan terpenuhinya peralatan oleh masing-masing personil atau implementor kebijakan, maka penyelenggaraan kebijakan karcis parkir berhadiah akan berjalan dengan lancar.

2. Lingkungan Implementasi

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Variabel lingkungan implementasi yang pertama yaitu kekuasaan, dimana kekuasaan implementor tertinggi yang terlibat dalam penyelenggaraan ini adalah Dinas Perhubungan. Selanjutnya untuk kekuasaan secara teknis di lapangan adalah Kepala UPTD Parkir Wilayah Selatan. Kekuasaan dan wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tetap berada pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, karena dalam hal ini UPTD Parkir hanya sebagai implementor pelaksana di lapangan saja dalam arti tidak memiliki kekuasaan atau wewenang untuk memutuskan kebijakan dalam implementasi kebijakan.

Strategi yang diterapkan dalam implementasi juga akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan seperti dilakukannya sosialisasi untuk meningkatkan kualitas aktor implementasi khususnya juru parkir, sosialisasi yang dimaksud adalah menjelaskan mengenai tugas yang harus dilakukan oleh juru parkir dalam menjalankan tugas dan apabila telah ditemukan pelanggaran ketika dilakukan adanya sidak gabungan antara staff Dinas Perhubungan dan kepolisian maka akan langsung dilakukan penindakan. Dengan adanya strategi tersebut maka diharapkan dapat memperlancar proses penyelenggaraan kebijakan karcis parkir berhadiah sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini menjelaskan

karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan karcis parkir berhadiah yang sesuai dengan Perwali Nomor 36 tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Perwali Nomor 37 tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, karakteristik lembaga yang terlibat yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang sangat menentukan kebijakan karcis parkir berhadiah ini dapat dijalankan atau sebaliknya.

Dinas Perhubungan sangat menentukan kebijakan yang dikeluarkan ini dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak karena menjadi satu-satunya rezim yang berkuasa dalam pengelolaan kebijakan karcis parkir berhadiah. Cara Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam mensukseskan kebijakan karcis parkir berhadiah ini yaitu selalu mengontrol perilaku juru parkir yang selama ini masih kurang baik dalam memberikan pelayanan dimata masyarakat. Selain itu juga memantau pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bertugas di UPTD parkir khususnya dalam pengelolaan kawasan parkir di Jalan Walikota Mustajab.

- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Hal yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa tingkat kepatuhan dari salah satu pelaksana kebijakan yaitu juru parkir dinilai sangat positif karena dengan adanya kenaikan tarif karcis parkir yang sesuai dengan Perwali Nomor 36 tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Perwali Nomor 37 tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ini maka juru parkir semakin tidak leluasa jika ingin menarik tarif parkir melebihi tarif yang sudah ada pada karcis parkir. Hal tersebut dapat dijadikan salah satu cara untuk meminimalisir potensi kebocoran PAD, namun jika dinilai dari tingkat kepatuhan juru parkir masih kurang meskipun tidak semua juru parkir melakukan kecurangan dalam menjalankan tugas.

Respon dari pelaksana dengan adanya beberapa kendala mengenai kepatuhan pelaksana kebijakan ini pihak Dinas Perhubungan langsung melakukan penindakan dan peninjauan ke lapangan di Jalan Walikota Mustajab untuk secara langsung membuktikan kenakalan juru parkir seperti menarik tarif parkir melebihi tarif yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Harapan Dinas Perhubungan Kota Surabaya kepada masyarakat dengan adanya kebijakan karcis parkir berhadiah ini supaya masyarakat lebih peduli dan lebih giat untuk meminta karcis parkir kepada juru parkir, jika masyarakat bisa membantu kesuksesan kebijakan ini tentunya juga dapat meminimalisir terjadinya kebocoran setoran retribusi dari parkir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari data yang diperoleh dalam penelitian di Jalan Walikota Mustajab mengenai implementasi kebijakan karcis parkir berhadiah oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari variabel-variabel yang menunjang keberhasilan dari implemenasi yaitu Isi Kebijakan terkait dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi yakni kurangnya kesadaran pihak juru parkir dalam menukseskan karcis parkir berhadiah. Hal itu ditunjukkan dengan sikap juru parkir yang masih melakukan kecurangan dalam menjalankan tugasnya. Manfaat yang dirasakan dengan adanya kebijakan karcis parkir berhadiah ini yaitu Dinas Perhubungan semakin mudah untuk pengelolaan sistem perparkiran yang ada di Kota Surabaya. Perubahan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan karcis parkir berhadiah ini adalah diharapkan dapat merubah sikap juru parkir yang kurang baik dalam menjalankan tugas dan masyarakat juga meminta karcis parkir jika tidak diberi oleh juru parkir. Hal itu tentunya dapat mengurangi potensi kebocoran retribusi parkir dan meningkatkan PAD retribusi parkir.

Berkaitan dengan pengambilan keputusan, sesuai dengan Perwali Nomor 36 tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Perwali Nomor 37 tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang menjadi dasar dari kebijakan karcis parkir berhadiah ini yang yang terlibat pada letak pengambilan keputusan ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pelaksana kebijakan ini yaitu Staff Dinas Perhubungan, koordinator juru parkir dan juru parkir. Sumber daya yang digunakan dalam kebijakan karcis parkir berhadiah ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya peralatan. Dalam sumber daya manusia yang ada khususnya juru parkir banyak diketahui memiliki SDM yang rendah karena tidak adanya sistem perekrutan yang baik pada bagian juru parkir. Sedangkan sumber daya peralatan ini adalah semua keperluan yang berhubungan dengan kegiatan karcis parkir berhadiah.

Pada Lingkungan Kebijakan, kekuasaan Dinas Perhubungan adalah memberikan tugas kepada koordinator juru parkir dan juru parkir untuk menjalankan kebijakan karcis parkir berhadiah ini dengan baik., strategi untuk kesuksesan kebijakan berupa dilakukannya sosialisasi untuk meningkatkan kualitas pelaksana kebijakan khususnya juru parkir. Karakteristik lembaga Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah berusaha dalam kesuksesan kebijakan ini, namun diperlukan kerjasama pengguna jasa parkir untuk meminta karcis parkir karena masyarakat juga masih pasif dalam membantu kebijakan karcis parkir berhadiah. Terdapat mandat yang diberikan oleh Walikota Surabaya dengan Perwali Nomor 36 dan 37 Tahun 2015 ini maka Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki tanggungjawab dalam menjalankan kebijakan karcis parkir berhadiah ini. Sedangkan tingkat kepatuhan dan respon dari juru parkir masih kurang dan rendah dalam menyikapi adanya kebijakan karcis parkir berhadiah ini.

Berikut saran yang dapat diajukan terkait dengan penelitian ini:

1. Harus dilakukan sistem perekrutan juru parkir yang lebih baik, agar sumber daya manusia yang bertugas khususnya juru parkir ini dapat menjalankan tugas sesuai dengan yang telah ditentukan.
2. Lebih sering dilakukan adanya inspeksi mendadak ke lapangan pada kawasan parkir bertujuan untuk melakukan peninjauan dan pengecekan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh juru parkir.
3. Dinas Perhubungan Kota Surabaya harus melakukan sosialisasi berupa pembinaan yang lebih sering kepada juru parkir agar mengetahui tupoksi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu sosialisasi untuk masyarakat atau pengguna jasa parkir untuk meningkatkan rasa tegas untuk tidak segan meminta karcis parkir kepada juru parkir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal skripsi ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Dengan adanya berbagai bantuan dari berbagai pihak, tantangan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa, dosen pembimbing Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si yang selalu memberi arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi, serta terimakasih untuk seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan ilmu pada penulis. Beserta staff administrasi tata usaha yang telah membantu kelancaran pengurusan proses skripsi penulis hingga terselesaikan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Halim, Abdul (2001), *Analisis Deskripsi Pengaruh Fiscal Stres Pada APBD Pemerintah Kabupaten dan kota di Jawa Tengah*. KOMPAK. STIE YO, Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Sarwoto, 2007, *Dasar - Dasar Organisasi dan Manajemen, Gunung Agung*, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tachjan, Dr. H. M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Widodo. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayu Media.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori Dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media press.

Website

- <http://www.bpkad.jatim.go.id>, diakses pada 2 September 2016
- <http://www.bpkp.go.id>, diakses pada 2 September 2016
- <http://dishub.surabaya.go.id/>, diakses pada 2 september 2016
- <http://kominfo.jatimprov.go.id/> diakses pada 2 September 2016
- <http://suarasurabaya.net>), diakses pada 2 oktober 2016

Skripsi

- Sanjani Mas Agus Hardian. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo*. Sidoarjo. Universitas Negeri Surabaya.
- Vina Rachmaya. 2016. *Implementasi Kebijakan Kemitraan Usaha Pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan Minimarket Dikabupaten Sidoarjo*. Sidoarjo. Universitas Negeri Surabaya.

Undang-Undang

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Sekretaris Daerah Kota Surabaya. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir. Sekretaris Daerah Kota Surabaya. Surabaya.

